

**EVALUASI KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
MELAKSANAKAN KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN TOLIKARA
PROVINSI PAPUA**

Mitera Yikwa

Npp. 30.1493

*Asdaf Kabupaten Tolikara Provinsi Papua
Program Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email : miterayikwa45@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr.Deti Mulyati,SH.MH,CN

ABSTRACT

Problems/background (GAP): Evaluation of the Performance of the Civil Service Police Unit in Implementing Public Order in Tolikara Regency. **Purpose:** which become obstacles and supporters as well as describe and analyze the efforts to overcome the obstacles. **Method:** design used is a qualitative descriptive approach. Data collection techniques used are interviews, documentation and observation. The theory used by researchers is performance theory according to Mitchel in the book Bintoro and Daryanto (2017: 158). **Result:** of this study indicate that the Civil Service Police Unit in carrying out public order in Tollikara Regency has been running but has not been optimal. As for the inhibiting factors, namely 1. Lack of personal members during the morning assembly at the office. 2. Limited facilities and infrastructure and lack of good maintenance, the supporting factors are 1. Good quality Human Resources (HR). the establishment of good communication and coordination within the internal environment of the Civil Service Police Unit of Tolikara Regency. **Conclusion:** the implementation of public order has been going well. However, there are still several obstacles that impede public order. The advice given in carrying out public order is the need for Satpol PP officers to increase their abilities by participating in formal and non-formal education. So that organizational tasks can be carried out according to the plan that has been set. It is necessary to provide continuous guidance to apparatus through leadership management training, so that apparatus have high initiative in working, and try to carry out work according to plan. As well as being able to understand their duties and responsibilities well, so that organizational tasks are carried out more effectively. The attention of the Regional Government is needed in providing facilities in the form of facilities and infrastructure that support the use of the Tolikara Regency Satpol PP Office in supporting the implementation of organizational tasks.

Keywords: Civil Service Police Unit Performance, Orderliness

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang: Evaluasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Melaksanakan Ketertiban Umum di Kabupaten Tolikara **Tujuan:** untuk mendeskripsikan dan menganalisis Evaluasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Melaksanakan Ketertiban Umum di Kabupaten Tolikara, mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukungnya serta mendeskripsikan dan menganalisis upaya-upaya yang untuk mengatasi hambatan. **Metode:** penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Teori yang digunakan peneliti adalah teori kinerja menurut Mitchel dalam buku Bintoro dan Daryanto (2017:158). **Hasil:** penelitian ini menunjukkan bahwa, Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan ketertiban umum di Kabupaten Tolikara sudah berjalan namun belum maksimal. Adapun yang menjadi faktor penghambat yaitu 1. Kurangnya personal anggota pada saat pelaksanaan apel pagi di kantor. 2. Terbatasnya sarana dan prasarana serta kurangnya pemeliharaan yang baik, faktor pendukungnya yaitu 1. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik. terjalannya komunikasi dan koordinasi yang baik di lingkungan internal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolikara. **Kesimpulan:** Pelaksanaan ketertiban umum sudah berjalan dengan baik. Namun masih ada beberapa kendala yang menghambat ketertiban umum. Saran yang di berikan dalam melaksanakan ketertiban umum adalah Perlunya aparat Satpol PP meningkatkan kemampuannya dengan mengikuti pendidikan formal dan non formal. Agar tugas-tugas organisasi dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Perlunya pembinaan dilakukan secara terus menerus kepada aparat melalui latihan manajemen kepemimpinan, agar aparat memiliki inisiatif yang tinggi dalam bekerja, dan berusaha melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana. Serta dapat memahami tupoksinya dengan baik, agar tugas-tugas organisasi lebih efektif dilaksanakan. Perlunya perhatian pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang menunjang digunakan oleh Kantor Satpol PP Kabupaten Tolikara dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi. **Kata kunci:** Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Ketertiban

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tepatnya pada alenia ke 4 yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban umum yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dengan demikian, tujuan tersebut haruslah dapat dilaksanakan, karena tujuan merupakan cita-cita bersama yang harus dicapai.

1.2 Kesenjangan Masalah Yang Diambil

Ketertiban umum sering terjadi di kota-kota besar atau ibu kota. Di era otonomi daerah seperti sekarang ini, keberadaan perda sangat penting untuk mengatur warganya agar menjadi warga Negara yang tertib dan sadar hukum membantu penegak hukum dalam bidang yang terutama berkaitan dengan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat Peraturan daerah dalam hal ini sebagai konsekuensi dari otonom daerah, yang mana pemerintah daerah dapat membuat aturan-aturan sendiri dan pelaksanaan penegakannya dapat juga dilaksanakan sendiri melalui aparat tersendiri pula yang masih dalam kerangka Republik Indonesia, yaitu Satpol PP. Satpol PP sebagai bagian perangkat daerah diatur oleh berbagai ketentuan terutama ketentuan hukum khususnya hukum administrasi pemerintahan daerah mempunyai kedudukan yang strategis. Keberadaan Satpol PP makin dirasakan di tengah-tengah masyarakat, hal ini diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak Perda, penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, seringkali harus berhadapan dengan masyarakat, badan hukum, dan bahkan aparatur yang tidak memahami Perda maupun kewenangan Satpol PP sebagai Penegak Perda dan penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

1.3 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu merupakan suatu karya tulis yang sebelumnya sudah pernah diteliti oleh seseorang mengenai permasalahan yang sesuai dengan judul yang diajukan oleh peneliti. Berkaitan dengan hasil penelitian sebelumnya, tentunya hasil dari penelitian ini dilakukan terdapat perbedaan dan persamaan. Sesuai hal ini, peneliti menjadikan penelitian sebelumnya sebagai acuan referensi dalam melaksanakan penelitian. Penulis dalam hal penelitian ini menggunakan empat hasil penelitian sebelumnya yaitu penelitian Oleh Desherianto (2016:415-418), Novia Yulianti (2013:1712-1723), Gunawan (2012:117-126) dan Darmawan (2018).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian yang dilakukan sebelumnya memiliki kesimpulan bahwa perbedaan secara umum dengan penelitian yang akan dilaksanakan adalah fokusnya, dimana penelitian yang akan dilaksanakan memiliki fokus terhadap evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan ketertiban umum dan juga terletak pada lokus penelitian, dimana penelitian yang akan dilakukan dilaksanakan di satu wilayah Kabupaten Tolikara.

1.5 Tujuan

1. Mengetahui dan menganalisis kinerja satuan polisi pamong praja dalam melaksanakan ketertiban umum di kabupaten tolikara
2. Mengetahui dan menganalisis faktor yang menghambat kinerja satuan polisi pamong praja dalam melaksanakan ketertiban umum di kabupaten tolikara

3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan kinerja Satuan polisi Pamong Praja dalam melaksanakan ketertiban umum di Kabupaten Tolikara.

II. METODE

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif. Alasan peneliti memakai metode pendekatan kualitatif karena mempunyai sifat yang selalu berubah-ubah bergantung pada situasi dan fleksibel serta mendalam dalam mengeksplorasi data di lapangan sehingga sesuai berguna bagi penelitian peneliti dengan focus evaluasi kinerja fungsi Satpol PP dalam melaksanakan penertiban umum. Dari permasalahan yang ada dibutuhkan beberapa data untuk dikumpulkan dan di analisis lebih lanjut maka untuk mengamati dan serta mengevaluasi kinerja aparat satpol pp metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan penelitian evaliatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Tolikara yang beribukota di Karubaga. Jumlah Kabupaten tolikara pada tahun 2020 berjumlah 250.742 jiwa, dengan kepadatan penduduk 44,87 jiwa, Luas wilayah Kabupaten Tolikara adalah \pm 1.456.400 Ha atau 14.564 Km². Pada tahun 2009 Kabupaten Tolikara yang terdiri dari 30 Distrik definitif dan 5 Distrik persiapan yang terbagi kedalam 507 kampung/kelurahan (503 kampung dan 4 Kelurahan), tahun 2010 terjadi pemekaran Distrik dan Kampung menjadi 46 Distrik dan 541 Kampung dan 4 Kelurahan.

3.1 Kondisi Geografis

Kabupaten tolikara memiliki luas wilayah 5,588,00 km yang terbagi menjadi 46 kecamatan dengan karubaga sebagai ibukota Kabupaten. Kabupaten ini memiliki penduduk sebanyak 250,742 jiwa (2020). Wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Sarmi di sebelah utara, Kabupaten Jayawijaya di sebelah selatan, Kabupaten Puncak Jaya di sebelah Barat dan Kabupaten Jayawijaya di sebelah timur. Dari ke 36 distrik yang ada (Karubaga, Kanggime, kembu, dan Bokondini), hanya distrik karubaga dan Kanggime yang dapat dijangkau melalui udara dan jalan darat. Melalui udara, distrik karubaga atau kanggime dapat dicapai dari wamena dalam waktu sekitar 2 jam. Secara administrasi kabupaten Tolikara berbatasan langsung dengan: Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sarmi dan Mambramo Raya Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lani Jaya Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Jayawijaya Sebelah barat berbatasan dengan Puncak Jaya.

3.2 Keadaan Demografi

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tolikara, Penduduk Kabupaten Tolikara Tahun 2021 mencapai 275.193 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 152.174 laki-laki dan 123.019 perempuan. Jumlah rumah tangga mencapai 55.039. Sehingga rata-rata penduduk per rumah tangga adalah 5 jiwa dengan sex ratio sebesar 124 yang berarti dari 124 laki-laki terdapat 100 perempuan. Tingkat

kepadatan penduduk mencapai 19 jiwa per km². Kepadatan Penduduk tertinggi pada distrik karubaga dengan 50 jiwa per km², sedangkan untuk distrik lainnya tingkat kepadatan rata-rata 8 sampai 10 jiwa per km².

3.3 Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tolikara

Visi Pemerintah Kabupaten Tolikara Visi ini merupakan janji yang disampaikan kepada masyarakat untuk dipenuhi diakhir masa periode jabatan kepala daerah terpilih. **“Terwujudnya Tolikara Yang Maju, Unggul Dan Mandiri”**
Misi Pembangunan Kabupaten Tolikara Meningkatkan Infrastruktur Daerah. Mengembangkan Kualitas Sumberdaya Manusia Mengembangkan Perekonomian Daerah Melestarikan Lingkungan Hidup Daerah.

3.4 Evaluasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melaksanakan Ketertiban di Kabupaten Tolikara

Berdasarkan data dan fakta yang telah dikumpulkan, berikut ini akan dilakukan pembahasan terkait evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan ketertiban umum di Kabupaten Tolikara, analisis faktor-faktor penghambat evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan ketertiban umum di Kabupaten Tolikara dan analisis upaya untuk mengatasi hambatan- hambatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan ketertiban umum di Kabupaten Tolikara.

3.4.1 Faktor Penghambat

Pelaksanaan kegiatan ketertiban terhadap lingkungan kantor dan kinerja dari Satpol PP tentu akan menemui kendala kendala yang harus dihadapi. Kendala tersebut berasal dari faktor internal sebagai berikut:

Faktor internal

Kendala yang paling utama berasal dari faktor internal Satpol PP Kabupaten Tolikara

1. Kurangnya personal anggota pada saat pelaksanaan apel pagi di kantor , jumlah personil Satpol PP Kabupaten Tolikara sudah cukup memadai, namun di hari yang ada kegiatan maka otomatis personal anggota Satpol PP akan berkurang dan tidak semua personal turun ke lapangan.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana serta kurangnya pemeliharaan yang baik.

3.4.2 Faktor Pendukung

Selain faktor penghambat, ada juga faktor pendukung yang menunjang pelaksanaan ketertiban umum terhadap lingkungan kantor di Satpol PP Kabupaten Tolikara diantaranya:

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik Kualitas SDM menjadi komponen penting bagi setiap instansi pemerintah. Karena dengan SDM yang baik tentu setiap kegiatan akan dengan mudah dilaksanakan. Kegiatan pelatihan bagi seluruh anggota Satpol PP Kabupaten Tolikara rutin dilaksanakan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman serta keterampilan. Hal ini disampaikan

pada wawancara terhadap bapak mohammad abdul selaku Kepala Bagian Tibumtranmas.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan ketertiban umum di Kabupaten Tolikara sudah berjalan namun belum maksimal. Adapun yang menjadi faktor penghambat yaitu kurangnya personal anggota pada saat pelaksanaan apel pagi di kantor. Terbatasnya sarana dan prasarana serta kurangnya pemeliharaan yang baik, faktor pendukungnya yaitu Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik, terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang baik di lingkungan internal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolikara.

IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan ketertiban umum sudah berjalan dengan baik. Namun masih ada beberapa kendala yang menghambat ketertiban umum. Saran yang di berikan dalam melaksanakan ketertiban umum adalah Perlunya aparat Satpol PP meningkatkan kemampuannya dengan mengikuti pendidikan formal dan non formal. Agar tugas-tugas organisasi dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Perlunya pembinaan dilakukan secara terus menerus kepada aparat melalui latihan manajemen kepemimpinan, agar aparat memiliki inisiatif yang tinggi dalam bekerja, dan berusaha melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana. Serta dapat memahami tupoksinya dengan baik, agar tugas-tugas organisasi lebih efektif dilaksanakan. Perlunya perhatian pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang menunjang digunakan oleh Kantor Satpol PP Kabupaten Tolikara dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu Kabupaten dengan waktu hanya 2 minggu.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tolikara tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar terciptanya tertib administrasi dan kehadiran Satpol PP Kabupaten Tolikara sesuai Peraturan yang telah ditetapkan

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih terutama ditujukan kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Tolikara Anggota Satpol PP, senior STPDN beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Bintoro, & Daryanto. (2017). *Manajemen Penilaian Kinerja Karyawan* (1st ed.). Gava Media.
- Darmawan. (2019). Implementasi Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Gresik. *Airlangga Development Journal*, 2(1), 21. <https://doi.org/10.20473/adj.v2i1.18025>
- Gunawan, G. (2012). Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum oleh Satpol PP dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Aceh.
- Hasibuan, R. M., Harahap, H. R., & Humaizi. (2022). Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Kinerja Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Mananti Sosa Jae. *Perspektif*, 11(2), 674-691.
- Ismawati, E. (2012). *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Yogyakarta: Ombak.
- Labolo, Dr. M., & Toana, Dr. A. A. (2016). *Kepamongpraajaan di Indonesia: Pertumbuhan dan perkembangannya*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Yulianti, N. (2013). EVALUASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR SUNGAI DAMA KOTA SAMARINDA.

